
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Lendrie Adi P. Rembet

Jurusan S1 - Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah,
Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

adirembet@gmail.com

Abstract : *A large number of road users who often pass by on the highway every day can cause problems in traffic, one of which is a traffic accident. The purpose of this study was to determine the effectiveness of criminal law enforcement in handling traffic violations. The research method used is qualitative research through literature study by applying the legal and statutory approaches that apply in Indonesia. The goal of public protection and safety can be achieved through enforcing criminal law in traffic violations. By imposing strict criminal sanctions, it is expected to prevent repeated violations and provide a deterrent effect to offenders. Justice and responsibility are important principles in enforcing criminal law on traffic violations.*

Keyword: *Effectiveness, Traffic, Criminal*

Abstrak : Pengguna jalan dengan jumlah banyak yang sering berlalu lalang di jalan raya setiap hari dapat menimbulkan permasalahan dalam lalu lintas salah satunya kecelakaan lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan pendekatan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan perlindungan masyarakat dan keselamatan dapat dicapai melalui penegakan hukum pidana dalam pelanggaran lalu lintas. Dengan memberlakukan sanksi pidana yang tegas, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Keadilan dan tanggung jawab menjadi prinsip penting dalam penegakan hukum pidana pada pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci : *Efektivitas, Lalu-lintas, Pidana*

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi secara rutin dapat menyebabkan risiko kecelakaan, kerugian materiil, cedera, dan bahkan kehilangan nyawa. Pengguna jalan dengan jumlah banyak yang sering berlalu lalang di jalan raya setiap hari dapat menimbulkan permasalahan dalam lalu lintas salah satunya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ialah tindakan melawan hukum yang termasuk salah satu unsur tindak pidana. Dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas memiliki konsep berbeda namun dapat berhubungan satu sama lain. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu tindakan oleh pengendara dalam mengendarai alat penggerak, yakni kendaraan bermotor maupun tidak, dan pejalan kaki yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada dan berlaku saat ini.

Dalam norma hukum, apabila terdapat warga negara yang melakukan suatu pelanggaran atas ketentuan hukum, maka negara mempunyai hak dalam pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan, baik sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan atau sanksi pidana khusus untuk delik yang telah diatur oleh undang-undang (Putri and Pratiwi 2023). Penegakan hukum pidana dalam konteks pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk menegakkan aturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.

Pangkal permasalahan selalu bersumber pada kurangnya kesadaran dan kebiasaan pengendara lalu lintas di jalan raya. Ketidaksiplinan dan ketidaktaatan tersebut tercermin dari perilaku berlalu lintas dengan mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan, menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara serta ketidaklengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Pemberlakuan tilang merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Dapat dikatakan bahwa surat tilang merupakan penegakan hukum berbentuk surat bukti pelanggaran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran (Hasiholan, Cuaca, and Krisnawangsa 2021).

Untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan dibutuhkan kesadaran tinggi bagi para pengguna jalan dalam menjaga keselamatan dirinya terutama mengenai kecepatan berkendara untuk disesuaikan dengan desain jalan yang ada, begitu juga dengan rambu-rambu yang ada untuk ditaati. Kecepatan kendaraan adalah faktor dominan penyebab kecelakaan di jalan, jika pengemudi memiliki kendaraan yang mampu mencapai kecepatan 150 km/jam ketika di jalan umum disesuaikan dengan desain jalan, sesuai atau tidak melaju kendaraan dengan kecepatan tinggi (Keumalasari and Tarmizi 2018).

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas seringkali menghadapi tantangan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam konteks ini termasuk keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, kepatuhan hukum dan kesadaran masyarakat, sistem hukum yang lambat, serta teknologi dan keahlian penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan pendekatan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder. Setelah terhimpun, sumber kepustakaan dikategorikan sesuai sub-sub pertanyaan, yaitu bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas.

PEMBAHASAN

a) Perlindungan masyarakat dan keselamatan dalam berlalu lintas

Kesadaran berlalu lintas sebagai salah satu bentuk dari kesadaran hukum pada umumnya, akan dapat menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang terjamin. Apabila para pengguna jalan umum, termasuk pejalan kaki dan pemakai kendaraan bermotor telah sadar memenuhi tata tertib dan sopan santun lalu lintas sebagai sikap diri, maka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dikarenakan faktor non manusia, bukan akibat kelalaian yang dilakukan oleh manusia seperti yang saat ini terjadi.

Perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi aturan lalu lintas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kesopansantunan pemakai jalan merupakan kunci pokok terciptanya kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Penegakan hukum pidana dalam pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memastikan keselamatan di jalan raya. Dengan menerapkan sanksi pidana yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang (Rochman, Husen, and Djanggih 2020).

1) Keselamatan Masyarakat

Pelanggaran lalu lintas yang serius dapat mengancam keselamatan masyarakat secara umum. Melalui penegakan hukum pidana, tindakan-tindakan yang membahayakan nyawa dan keselamatan orang lain dapat ditekan. Ini membantu menjaga keselamatan semua pengguna jalan, termasuk pengemudi, pejalan kaki, dan pengendara sepeda.

2) Perlindungan Korban

Penegakan hukum pidana dalam pelanggaran lalu lintas membantu memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan atau pelanggaran. Dengan memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggar, korban diberi rasa keadilan dan merasa dihargai. Hal ini juga memberikan sinyal bahwa tindakan pelanggaran tidak akan ditoleransi dan korban dapat berharap pada sistem hukum untuk mendapatkan keadilan.

3) Pencegahan Kecelakaan dan Cedera

Dengan memberlakukan hukuman pidana yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek pencegahan yang kuat bagi individu yang cenderung melanggar aturan lalu lintas. Ini membantu mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan cedera yang disebabkan oleh perilaku yang tidak aman di jalan raya. Penerapan hukuman pidana yang adil dan proporsional dapat menjadi deterrensi bagi pelanggar potensial.

4) Penegakan Aturan Lalu Lintas

Penegakan hukum pidana dalam pelanggaran lalu lintas juga membantu memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Dengan menegakkan hukum secara konsisten, memberikan sanksi kepada pelanggar, dan memperkuat kepatuhan terhadap aturan, dapat menciptakan budaya keselamatan di jalan raya.

5) Tanggung Jawab Sosial

Penegakan hukum pidana dalam pelanggaran lalu lintas mencerminkan tanggung jawab sosial untuk melindungi kehidupan dan keselamatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan sistem hukum serius dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan orang lain dan mempengaruhi kualitas hidup (Sajudin 2017).

Melalui penegakan hukum pidana dalam pelanggaran lalu lintas, diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut dan menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua orang.

b) Keadilan dan tanggung jawab dalam Tindakan pelanggaran lalu lintas

Hukum pidana memastikan bahwa setiap pelanggar lalu lintas bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik, hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas bergantung pada penerapan hukuman yang adil dan proporsional (Hidayat, Semendawai, and Mawadi 2022).

Penerapan hukuman yang adil adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum. Setiap pelanggar lalu lintas harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau keuntungan yang tidak adil. Hukuman yang adil memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa sistem hukum beroperasi dengan keadilan dan integritas. Hukuman yang adil dan proporsional dapat memberikan efek pencegahan yang lebih kuat. Jika hukuman terlalu ringan atau tidak sebanding dengan tingkat pelanggaran, pelanggar mungkin tidak merasa terdorong untuk mengubah perilaku mereka. Di sisi lain, hukuman yang terlalu berat juga tidak diinginkan karena dapat menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan (Amrus, Abbas, and Djanggih 2021).

Selain itu penerapan hukuman yang adil dan proporsional dapat berkontribusi pada deterrensi umum, yaitu mencegah orang lain untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran lalu lintas dihukum secara adil dan proporsional, hal ini dapat menjadi pengingat dan memberikan motivasi bagi mereka untuk mematuhi aturan lalu lintas. Jika masyarakat merasa bahwa hukuman tidak adil atau tidak sebanding dengan pelanggaran, kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dapat terkikis. Hal ini dapat mengarah pada penurunan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

c) Pencegahan tindak pelanggaran lalu lintas yang berulang

Penggunaan hukum pidana dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang berulang. Terjadinya pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan, tentu ada faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut

1. Yang pertama ada dari faktor substansinya atau hukum itu sendiri, ini diartikan sebagai pada peraturan yang ada dan diterapkan di masyarakat.
2. Selanjutnya pada faktor strukturnya yaitu aparat penegak hukum sebagai orang yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Djoko Prakoso mengemukakan mengenai aparat penegak hukum yang merupakan penggerak hukum tersebut. Hukum itu statis dan hanya diam, ibarat janji, melalui penggunaannya oleh para penegak hukumlah hukum itu dapat berguna dan bermanfaat dengan moral di dalamnya, begitu pula seperti janji yang terwujud melalui peran penegak hukum itu sendiri.
3. Masih kurang memadai dan layaknya sarana serta fasilitas dalam penegakkan hukum begitu pula kondisi jalan raya yang masih banyak terjadi kerusakan serta kurang perhatian dari pihak yang berwenang.
4. Ada pula faktor dari masyarakatnya, dimana rasa atau sikap kepedulian yang kurang serta kesadaran akan bahaya dalam penyimpangan berkendara yang sangat minim. Dalam buku Penegakan Hukum karya Soerjono Soekanto, ia mengemukakan bahwa secara ringkas suatu hukum dapat berfungsi dengan baik,

jika masyarakatnya memiliki tingkat keparuhan erta kesadaran yang tinggi untuk memahami hukum itu sendiri. Setidaknya dengan itu, fungsi hukum dapat dirasakan. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku ini disebabkan karena adanya proses internalisasi

5. aktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto dalam Krisna, Sugiarta, and Subamiya 2021)

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar dapat membuat mereka berpikir dua kali sebelum melanggar aturan lalu lintas lagi. Selain itu, proses peradilan yang ketat dan efisien juga dapat memberikan sinyal yang kuat kepada masyarakat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak akan ditoleransi. Beberapa alasan mengapa penggunaan hukum pidana dapat berkontribusi dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang berulang:

- 1) Efek jera

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas dapat memberikan efek jera yang kuat. Dengan menghadapi konsekuensi yang serius, pelanggar akan lebih berpikir dua kali sebelum melanggar aturan lalu lintas lagi. Dalam beberapa kasus, ketakutan akan hukuman pidana dapat mengubah perilaku pelanggar dan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

- 2) Penyadaran akan risiko dan kesalahan

Melalui proses hukum pidana, pelanggar lalu lintas dapat diberikan kesempatan untuk menyadari risiko dan kesalahan mereka. Melalui proses pengadilan, mereka dapat menghadapi akibat dari tindakan mereka dan menyadari dampak negatif yang ditimbulkannya. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk merenungkan perilaku mereka dan berkomitmen untuk tidak melanggar aturan lalu lintas di masa depan.

3) Penghormatan terhadap hukum dan otoritas

Penggunaan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dapat meningkatkan penghormatan terhadap hukum dan otoritas. Dengan menegakkan hukum secara konsisten, masyarakat dapat melihat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak akan ditoleransi dan bahwa ada konsekuensi serius bagi mereka yang melanggar. Hal ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum dan mendorong ketaatan terhadap aturan lalu lintas.

Meskipun penggunaan hukum pidana dapat memberikan kontribusi dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang berulang, penting untuk diingat bahwa pendekatan ini tidaklah satu-satunya. Sanksi administratif, pendidikan, dan kampanye kesadaran juga merupakan faktor penting dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang efektif. Kombinasi dari berbagai strategi ini dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam mempromosikan kesadaran, kepatuhan, dan keselamatan di jalan raya.

d) Konsistensi penegakan hukum yang efisien

Praktik untuk melaksanakan dan menegakan hukum di lapangan acap kali mengakibatkan konflik baik kepastian hukum maupun keadilan hukum. Penyebab keadaan tersebut yakni adanya persepsi keadilan didefinisikan sebagai konsep yang abstrak, sementara itu kepastian hukum didefinisikan sebagai proses yang ditetapkan secara normatif. Sehingga ketidakjelasan atas rumusan perbuatan pidana dapat mengakibatkan sifat multi tafsir yang berdampak pada kepastian hukum. Konsep restorative justice yang masih belum dirancang secara khusus melalui Undang-Undang tersendiri mengakibatkan adanya perbedaan perspektif dalam penerapannya (Putri and Pratiwi 2023).

Efektivitas penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas juga terkait dengan efisiensi sistem peradilan pidana. Penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dilakukan secara cepat, adil, dan efisien. Proses peradilan yang panjang dan birokratis dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus ini (Amrus, Abbas, and Djanggih 2021). Selain itu

adanya konsistensi penegakan hukum pidana pada pelanggaran lalu lintas menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas sistem penegakan hukum. Adapun beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam konsistensi penegakan hukum pidana pada pelanggaran lalu lintas:

1. Penegakan hukum yang adil

Konsistensi penegakan hukum pidana pada pelanggaran lalu lintas memerlukan penerapan hukum yang adil dan setara bagi semua pelanggar. Tidak boleh ada diskriminasi atau preferensi tertentu terhadap individu atau kelompok tertentu. Prinsip-prinsip hukum pidana, seperti prinsip kesetaraan di hadapan hukum, harus ditegakkan dengan konsisten.

2. Klarifikasi aturan dan standar

Konsistensi penegakan hukum pidana pada pelanggaran lalu lintas juga memerlukan klarifikasi yang jelas mengenai aturan dan standar yang berlaku. Hukum lalu lintas harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pengguna jalan. Hal ini akan membantu menghindari kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan konsistensi.

3. Penegak hukum yang terlatih dan profesional

Konsistensi penegakan hukum pidana pada pelanggaran lalu lintas juga tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme penegak hukum. Pelatihan yang memadai untuk petugas penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas dapat membantu memastikan konsistensi dalam penegakan hukum.

4. Sistem pemrosesan yang efisien

Konsistensi penegakan hukum pidana pada pelanggaran lalu lintas juga terkait dengan efisiensi sistem pemrosesan hukum. Proses peradilan yang panjang dan lambat dapat mengurangi konsistensi dalam penegakan hukum, karena ada risiko adanya perbedaan dalam perlakuan terhadap pelanggar yang serupa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan sistem pemrosesan yang efisien dan tepat waktu.

5. Pengawasan dan akuntabilitas

Konsistensi penegakan hukum pidana pada pelanggaran lalu lintas juga memerlukan pengawasan yang efektif terhadap penegak hukum. Mekanisme pengawasan internal

dan eksternal yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Akuntabilitas juga penting dalam memastikan bahwa penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas melibatkan beberapa faktor penting. Tujuan perlindungan masyarakat dan keselamatan dapat dicapai melalui penegakan hukum pidana dalam pelanggaran lalu lintas. Dengan memberlakukan sanksi pidana yang tegas, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Keadilan dan tanggung jawab menjadi prinsip penting dalam penegakan hukum pidana pada pelanggaran lalu lintas. Adanya penegakan hukuman yang adil dan proporsional dapat memastikan bahwa setiap pelanggar bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Penegakan hukum pidana dapat berperan dalam pencegahan pelanggaran yang berulang. Melalui sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar, diharapkan mereka akan berpikir dua kali sebelum melanggar aturan lalu lintas lagi. Konsistensi penegakan hukum pidana pada pelanggaran lalu lintas sangat penting. Penegakan hukum yang konsisten, adil, dan setara bagi semua pelanggar akan membantu menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

SARAN

Beberapa saran yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas:

- 1) Penegakan yang Konsisten: Penting untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Ini berarti menerapkan sanksi yang serupa untuk pelanggaran yang serupa. Konsistensi dapat memperkuat efek pencegahan dan memberikan sinyal yang jelas bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi.
- 2) Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aturan lalu lintas dan konsekuensi pelanggaran sangat penting. Kampanye publik, edukasi, dan sosialisasi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari pelanggaran lalu lintas. Kesadaran yang lebih tinggi dapat mempengaruhi perilaku pengemudi dan mendorong kepatuhan terhadap aturan.
- 3) Penyediaan Sumber Daya yang Memadai: Memastikan adanya sumber daya yang memadai, seperti personel, kendaraan patroli, dan peralatan, untuk melakukan penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas sangat penting. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan menyebabkan penanganan yang lambat atau tidak memadai terhadap pelanggaran.
- 4) Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi modern, seperti kamera pemantauan, sistem pemantauan kecepatan, atau teknologi lainnya, dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, dan mendukung proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrus, Andi Baso, Ilham Abbas, And Hardianto Djanggih. 2021. “Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.” *Toddopuli Law Review* 1(April): 84–90.
- Hasiholan, Christian Tarapul Anjur, Navanya Gabriel Cuaca, And Hans Christoper Krisnawangsa. 2021. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik.” *Spektrum Hukum* 18(2): 15–27.
- Hidayat, Taufik, Abdul Haris Semendawai, And Habloel Mawadi. 2022. “Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung).” *Veritas* 8(2): 166–90.
- Keumalasari, Dewi, And Tarmizi. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh).” *Jim Bidang Hukum Pidana* 2(3): 449–55.
- Krisna, I Gede, I Nyoman Gede Sugiarta, And I Nyoman Subamiya. 2021. “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2(2): 338–43.
- Putri, Chalisna Paristiana, And Dian Esti Pratiwi. 2023. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta.” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 7(2): 234–43.
- Rochman, Fatur, La Ode Husen, And Hardianto Djanggih. 2020. “Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.” *Indonesian Journal Of Criminal Law* 2(12): 1–14.
- Sajudin, Mohammad. 2017. “Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (Adr).” *Jurnal Spektrum Hukum* 14(1).